

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

A.1 Pentingnya Rekonstruksi Kurikulum MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Malang

Kebutuhan untuk merekonstruksi kurikulum MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan setelah era reformasi mutlak diperlukan karena pada era sebelumnya telah terjadi kebijakan dalam dunia pendidikan yang “diselewengkan” sekedar untuk mendukung dan melegitimasi rezim yang berkuasa. Penyelenggaraan pendidikan telah digunakan sebagai sarana pengendalian anak bangsa untuk tunduk dan tidak melakukan perlawanan terhadap kelangsungan kekuasaan yang feodal-sentralistik-otoriter. Sebagai dampaknya yang terlihat adalah sistem pendidikan nasional yang kehilangan orientasinya untuk mencerdaskan anak bangsa, bahkan yang terjadi sebaliknya, yaitu proses “pengkerdilan” berpikir dan bertindak sebagai upaya sebuah rezim melanggengkan kekuasaan.

Penanganan pendidikan yang bermasalah tersebut, karena semakin disingkirkannya falsafat yang melandasi pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan menjadi terbenam dalam arus pendidikan kontemporer-praktis yang berupa:

1. Pandangan bahwa problematik pendidikan sudah tidak lagi terletak di dalam aspek normatifnya, tapi sekarang telah beralih ke dalam aspek teknisnya.
2. Pandangan bahwa pendidikan harus kembali ke tugas utamanya, yakni melestarikan nilai-nilai hidup masa lalu, demi memelihara kebesaran bangsa dan ketinggian peradaban yang sudah mapan, jadi bukan lagi masalah mencari landasan baru.
3. Pandangan bahwa kebijakan pendidikan sudah ada dan sudah jelas, yakni kebijakan untuk menggunakan sekolah sebagai penyiapan sumber daya

4. Pandangan bahwa pendidikan abad ini harus dikembangkan dan dikelola secara modern sebagai industri besar.

Berangkat dari berbagai landasan pemikiran di atas, maka pola umum rekonstruksi kurikulum MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan berpijak pada:

- 1) Surat Edaran Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang No. SE. PR I No. E.6.f/084/BAA-UMM/II/2001 tentang Lokakarya Kurikulum khususnya diktum ke 4 butir b.), yang isinya mengenai Rencana Kebijakan Universitas untuk menerapkan aturan baru dengan penyajian 2 SKS / IJS untuk Pendidikan Pancasila dan 2 SKS / 1 JS untuk Pendidikan Kewarganegaraan, yang disajikan dalam semester yang bersamaan.
- 2) Dalam penyusunan kurikulum yang baru (.direkonstruksi) memperhatikan penge-lompokan materi (Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan, SKS/JS) dengan rational yang kuat, penampakan pendekatan keilmuan, sumbangan terhadap pendidikan moral / nilai-etik / budi pekerti untuk Pendidikan Pancasila (PP) dan wawasan kebangsaan/ kewarganegaraan (*civic education*) untuk Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dengan paradigma baru yang memenuhi standart dan syarat Akreditasi Nasional.
- 3) Penyajian matakuliah memperhatikan prasyarat keilmuan yang bersangkutan, sehingga bentukan dan sistematika urutan keilmuannya tetap terjaga. Ibarat sebuah pohon, nampak akar, batang, cabang dan ranting.
- 4) Selain itu rekonstruksi kurikulum MKPK PP & PKN juga harus disesuaikan dan dipadukan antara materi (pokok bahasan/ sub pokok bahasan), metode, media (sarana dan prasarana/buku ajar) serta alat evaluasi dalam perkuliahan dengan waktu yang tersedia selama semester yang ber-sangkutan, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan prinsip efisiensi & efektifitas tanpa mengurangi aspek kualitas dan tujuan (*goal*) mata kuliah itu sendiri.
- 5) Di samping itu rekonstruksi kurikulum MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendi-dikan Kewarganegaraan juga dilakukan dengan memperhatikan 9

- a) prinsip relevansi (misi dan visi universitas, kontekstual, tuntutan dunia kerja);
- b) prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraannya;
- c) prinsip fleksibilitas (jenis program, materi dan keluwesannya);
- d) prinsip kontinuitas (kesinambungan program dengan misi dan visi matakuliah serta universitas)
- e) prinsip orientasi pada tujuan ;
- f) prinsip integritas;
- g) prinsip sinkronisasi;
- h) prinsip obyektivitas serta
- i) prinsip demokrasi

maka langkah rekonstruksi dan reuiu kurikulum MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Paradigma Baru untuk era Reformasi saat ini sangat mutlak untuk dilakukan agar tetap relevan dan tidak ketinggalan zaman (up to date). Dalam mainstream tersebut maka lokakarya rekonstruksi kurikulum MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraann di lakukan pada tanggal 18 Mei 2001 s/d 23 Mei 2001.

B. ANALISIS SWOT

B. 1 Strenghts (Keunggulan) Matakuliah

Apabila dikaji dari sudut keunggulannya, maka matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat dilihat dari dimensi internal yang meliputi urgensi dari keberadaan matapelajaran./ matakuliah Pendidikan Pancasila dan Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurnas yang merupakan dua komponen dasar dari Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) di lingkungan perguruan tinggi yang sejalan dengan visi Universitas Muhammadiyah Malang untuk mengembangkan wacana Keilmuan dan Keislaman. Kedudukan matakuliah ini begitu strategis untuk menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesetiaan pada ideologi yang rasional dan obyektif, yang akhir-akhir ini tercabik-cabik dan terancam desintegrasi bangsa. Begitu juga kondisi

berbagai perilaku kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Sehingga matakuliah ini punya visi dan misi yang strategis untuk mewujudkan *civil society* /masyarakat madani yang beradab yang dicita-citakan gerakan reformasi saat ini. Di samping itu dari faktor SDM para pengelola (dosen pembina) matakuliah mempunyai background/latar belakang Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dan Magister di bidang yang relevan dengan masalah civic education.

Berbagai buku ajar sebagai sarana penunjang perkuliahan sedang disusun, begitu juga berbagai penelitian unggulan Tim pengembang dan perancang MKPK Pendidikan Pancasila akan terus digalakkan untuk memperkaya kasanah perbendaharaan keilmuan para dosen dan mahasiswanya. Kerjasama dengan berbagai instansi baik antar perguruan tinggi (LKPKB), LSM (CICED) dan Konsultan Publik (P3 - MDK / CEPED-WES) dilakukan dengan prinsip kemitraan, keterbukaan dan profesionalitas.

B.2 Weaknesses (Kelemahan) MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan

Sedangkan dari sudut kelemahannya, maka matakuliah MKPK PP & PKN ini untuk saat ephoria reformasi memang mengalami distorsi nilai dan urgensi serta vitalitasnya yang disebabkan karena kegagalan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan di masa lalu (ORBA). Gejala distorsi nilai etik serta titik jenuh ini muncul karena terjadinya booming ephoria reformasi yang kehilangan arah dan pegangan dari tujuan semula. Kemudian untuk kelemahan pelaksanaan penyelenggaraan matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan di Universitas Muhamamdiyah Malang selama ini yang menerapkan kebijakan PBM *on-off* dirasa tidak berhasil dan sering terjadi *off-nya* karena kekurangan jumlah tenaga pengajar. Kenyataan ini lebih *disebabkan pengelolaan matakuliah ini tidak ditangani secara memadai dan optimal*. Mulai dari soal pengkoordinasiannya hingga kualifikasi pengajarnya tidak terkontrol.

sosok sebenarnya. Selain itu yang dapat dipertanyakan adalah siapa dosen yang terlibat menangani pelaksanaan Ujian Pengawasan Mutu (UPM) bagi jurusan yang berstatus terdaftar atau diakui / belum terakreditasi.

B.3 Opportunities (Peluang) MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan

Berangkat dari semangat perjuangan dan perubahan kurikulum MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang menggunakan paradigma baru maka matakuliah ini pada tahun akademik 2001/2002 mencoba mengembangkan MKPK PP & PKN yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Malang untuk ikut berkiprah dalam dunia pendidikan untuk menyiapkan mahasiswanya menjadi sarjana yang lengkap dan mumpuni di bidangnya yang mempunyai visi keilmuan dan keislaman. Di samping itu, kebijakan pemerintah (Diknas) yang memasukkan matakuliah ini pada komponen MKPK (Matakuliah Pengembangan Kepribadian) di PT sesuai dengan SK Dirjen Dikti No. 265/Dikti/Kep/2000 untuk MKPK Pendidikan Pancasila dan No. 267/Dikti/Kep/2000 untuk MKPK Pendidikan Kewarganegaraan.

B.4 Threats (Tantangan/Hambatan) MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan

Dilihat dari aspek tantangan/hambatan yang dihadapi matakuliah ini adalah adanya anggapan atau image yang kurang baik terhadap matakuliah ini yang dianggap menjadi alat legitimasi pemerintah Orde Baru (alat indoktrinasi). Sehingga perguruan tinggi /masyarakat sebagian merasa alergi untuk mengajarkan matakuliah ini. Kondisi sosial politik dan perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia yang lagi mengalami ephoria reformasi seakan-akan sudah melupakan kedudukan dan fungsi "Pancasila" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga sangat beralasan apabila Prof. Koento Wibisono menganjurkan untuk dilakukan "Radikalisasi Pancasila" kembali untuk mengarahkan bangsa Indonesia

dicetuskan para pendiri negara republik ini. Untuk menjamin idependensi matakuliah dan tujuan matakuliah MKPK PP & PKN di perguruan tinggi memang sangat perlu kiranya untuk dilakukan reorientasi kembali visi dan misi serta tujuan matakuliah PP & PKN di perguruan tinggi untuk mendidik warganegara yang demokratis tanpa indoktrinasi ataupun intervensi dari penguasa/pemerintah. Ini adalah sebuah tantangan bagi Tim Pengembang MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Malang untuk mewujudkan dirinya sebagai *think-thunk civic- education* yang handal di masa depan.

C. TUJUAN MATAKULIAH

Matakuliah Pendidikan Pancasila sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 265/DIKTI/KEP/2000 bertujuan agar Mahasiswa:

- 1) dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam kehidupannya sebagai warga-negara Republik Indonesia;
- 2) menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
- 3) memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan ipteks dan pembangunan;
- 4) membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila.

Sedangkan matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar mahasiswa:

- a. dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warganegara terdidik

- b. menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak di atasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggung jawab;
- c. memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Bobot pengajaran matakuliah MPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana ketentuan Keputusan Dirjen Dikti No. 265/DIKTI /KEP/2000 pasal 5 ayat 3 dan No.267 / DIKTI / KEP / 2000 pasal 5 ayat 3 adalah 2 SKS .

D. DESKRIPSI MATAKULIAH

1. Deskripsi Singkat Matakuliah

- 1) Matakuliah ini diberikan kepada mahasiswa semua program studi dengan SKS minimal 2 SKS (Pendid. Pancasila) dan 2 SKS (Pendid. Kewarganegaraan).
- 2) Matakuliah Pendidikan Pancasila menjelaskan tentang landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila, pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia, Sistem Ketatanegaraan RI, dinamika pelaksanaan UUD 1945, Pancasila sebagai sistem Filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai ideologi serta Pancasila sebagai Paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan meliputi pokok-pokok bahasan tentang: (a) Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup: hak dan kewajiban warga negara, pendidikan pendahuluan belanegara; demokrasi Indonesia, dan hak azasi manusia. (b) Wawasan Nusantara, (c) Ketahanan Nasional dan (d) Politik dan Strategi Nasional.

2. Ruang Lingkup Materi dan Penyajiannya

2.1 Matakuliah Pendidikan Pancasila

No.	Pokok Bahasan	Buku Sumber	Metode	Pertemuan
*	Perkenalan & Deskripsi MK/	-	Ceramah Interviu	Minggu 1

1.	Landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila a. Landasan Pendidikan Pancasila b. Tujuan Pendidikan Pancasila	Kode Buku : a)* h)* o)*	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	Minggu II
2.	Pertumbuhan Faham Kebangsaan Indonesia a. Masa Kejayaan Nasional; b. Perjuangan BI melawan Penjajahan; c. Proklamasi 17 - 8 - 1945 d. Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.	Kode Buku: a)* k)* o)* p)*	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	Minggu III Dan Minggu IV
3.	Pengertian, Kedudukan, sifat dan fungsi UUD 1945 dan Pembukaan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental a. Pengertian, kedudukan, sifat dan fungsi UUD 1945 b. Pembukaan UUD 45 dan pokok pikiran yang terkandung di dalamnya c. Sistem pemerintahan negara RI berdasar UUD 1945. d. Dinamika pelaksanaan UUD 1945	Kode Buku: a)* b)* e)* h)* i)* q)*	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Resitasi	Minggu V Minggu VI Dan Minggu VII
4.	<i>C. Middle Test</i>	<i>D. Materi 1-3</i>	Taxe Home /analisa Kasus dan pemecahannya	Minggu VIII
5.	Pancasila Sebagai Sistem Filsafat a. Cara dan Ciri berfikir filsafati; b. Pengertian Pancasila secara filsafati; c. Nilai-Nilai Pancasila sebagai dasar keseimbangan hak dan kewajiban warga negara.	Kode Buku: a)* b)* c)* d)* f)* h)* l)*	1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Resitasi	Minggu IX Dan Minggu X
6.	Pancasila Sebagai Ideologi a. Pengertian Ideologi b. Makna ideologi bagi negara; c. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain; d. Pancasila sebagai ideologi terbuka.	Kode Buku: a)* c)* g)* h)* i)* n)* j.	1. Diskusi 2. Resitasi 3. Portofolio 4. Analisa Kasus	Minggu XI Dan Minggu XII
7	Pancasila sebagai Paradigma	Kode Buku:		

	bangsa dan bernegara (paradigma pembangunan nasional); a. Pengertian paradigma; b. Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK	e)* h)* i)* j)* n)* j.	1. Diskusi 2. Resitasi 3. Portofolio 4. Role Playing	Minggu XIII Dan Minggu XIV
8.	Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan Kampus; a. Tridharma Perguruan Tinggi; b. Budaya Akademik; c. Kampus sebagai Moral Force pengembang. hukum dan HAM	Kode Buku: a)* g)* j)* k)* p)* q)* b. i. j.	1. Diskusi 2. Analisa Kasus 3. Portofolio 4. VCT	Minggu XV
9.	Final Test	Materi 1-8	1. Ujian Lisan 2. Ujian Kelompok 3. Ujian Tulis	Minggu XVI

2.2 Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan

No.	Pokok Bahasan	Buku Sumber	Metode	Pertemuan
*	Perkenalan & Deskripsi MK/ Silabus MK		1. Ceramah 2. Interview	Minggu I
1.	Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan: a. Latarbelakang dan sejarah serta kompetensi yang diharapkan; b. Pemahaman tentang bangsa, negara dan hak kewajiban serta HAM dan bela negara; c. Keterkaitan Pancasila, UUD 1945, Wasantara dan Tannas; d. Perkembangan PKN;	Kode Buku: 1)# 2)# 3)# 4)# 6)# 16)# a. c. e. h.	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Role Playing	Minggu II Minggu III Dan Minggu IV
2.	Konsep Wasantara; a. Latarbelakang filosofis Wasantara; b. Wasantara sebagai wawasan pembangunan nasional; c. Implementasi wasantara;	Kode Buku: 1)# 4)# 8)# 9)# 12)# 13)# 14)# j.	1. Diskusi 2. Ceramah 3. Analisa Kasus	Minggu V Dan Minggu VI
3.	E. Middle Test		Taxe Home exam / Tulis	Minggu VII

4.	Konsepsi dan Peran Tannas di Indonesia: a. Latar belakang dan konsepsi serta kondisi tannas di Indonesia; b. Pokok-pokok pikiran tentang tannas; c. Pengaruh HAM, Demokrasi dan lingkungan hidup dalam Tannas (IPOLEKSOSBUDHAN KAM):	Kode Buku: 1)# 3)# 4)# 16)# b. c. i. j.	1. Analisa Ka-sus 2. Diskusi 3. Resitas i	Minggu VIII Minggu IX Minggu X Dan Minggu XI
5.	Politik dan Strategi Nasional a. Perkembangan pengertian politik dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. b. Perkembangan pemikiran strategis dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan c. Politik Pembangunan Nasional, manajemen nasional dan otonomi daerah; d. Implementasi politik dan strategi nasional dalam bidang-bidang pembangunan nasional	Kode Buku: 1)# 3)# 4)# 12)# 14)# 15)# 16)# d. i. f.	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Resitasi	Minggu XII Minggu XIII Minggu XIV Dan Minggu XV
6.	Final Test		Ujian Tulis/ Lisan dan Portofolio	Minggu XVI

E. JADWAL DAN WAKTU PELAKSANAAN

JADWAL ACARA LOKAKARYA KURIKULUM MKPK PENDIDIKAN PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PPKN) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG JUM'AT, 18 MEI 2001

No	Hari, Tanggal	Waktu	Kegiatan	Tempat
1	Jum'at, 18 Mei 2001	08.00 - 09.00	Pembukaan (Pembantu Rektor I)	Ruang Sidang PR I
		09.00 - 11.30	Pembahasan Kurikulum Pendidikan Pancasila (Misi, Visi, Isi, Metode dan Evaluasi PBM Pendidikan Pancasila Menyambut Pendidikan Pancasila Paradigma Baru Nara Sumber Tim Pembahasan MKPK Pancasila	Ruang Sidang PR I

		11.30 - 12.45	Sholat Jum'at	Masjid AR. Fachrudin
		12.45 - 13.30	Istirahat dan Makan Siang	Ruang Sidang PR I
		13.30 - 15.30	Pembahasan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (Misi, Visi, Isi, Metode dan Evaluasi PBM Pendidikan Kewarganegaraan Menyambut Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru. Nara Sumber Tim Pengembang MKPK PKN	Ruang Sidang PR I
		15.30 - 15.45	Break	Ruang Sidang PR I
		15.45 - 16.45	Perumusan Hasil	Ruang Sidang PR I
		16.45 - 17.00	Penutupan (Kabag AIK/MKU)	Ruang Sidang PR I

F. KEPANITIAAN

Penanggung Jawab : 1. Pembantu Rektor I
2. Kepala Bagian AIK dan MKU

Ketua/Koordinator Tim/

Sekretariat : Dra. Nurul Zuriah, M.Si
(Koordinator Tim MPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Malang)

Wakil Ketua/ Perlengkapan: Drs. Agus Tinus
(Wakil Koordinator Tim MPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Malang)

Bendahara Tim : Dra. Trisakti Handayani, MM

- Sie Acara : Drs. Budiono
(Anggota Tim MPK Sub. Bidang Pendidikan Kewarganegaraan.)
- Sie Publikasi & Dokumentasi : Drs. M. Mansur Ibrahim
(Anggota Tim MPK Sub. Bidang Pendidikan Kewarganegaraan)
- Dekorasi : Drs. Mohammad Syahri Roesman, M.Si.
(Anggota Tim MPK Sub. Bidang Pendidikan Kewarganegaraan)
- Sie Persidangan : Drs. Rohmad Widodo, M.Si.
(Anggota Tim MPK Sub. Bidang Pendidikan Pancasila)

G. PESERTA

Jumlah Peserta lokakarya kurikulum MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang diundang kali ini berjumlah 34 orang dengan perincian 3 orang pejabat dari Universitas (PR I, Kabiro AA, Kabag AIK dan MKU) 10 pejabat berasal dari lingkungan Fakultas di UMM (PD I) dan selebihnya 21 orang dosen pembina MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang berstatus dosen tetap maupun dosen luar biasa.

Adapun nama masing-masing peserta seperti di bawah ini.

No	Nama	Status/ Kedudukan	Keterangan
1.	Ir.H.Muhammad Hamzah, MS.	PR I	Hadir
2.	Ir. Damat, MP.	Kabiro AA	Hadir
3.	Drs. Khozin, M.Si.	Kabag AIK dan MKU	Hadir
4.	Dra. Nurul Zuriyah, M.Si.	Koordinator Tim MKPK PP & PKN	Hadir
5.	Drs. Agus Tinus	Wakil Koordinator Tim MKPK PP & PKN	Hadir

20.	Drs. H. M. Mansyur, MM	Dosen Pembina MKPK PP & KN	Hadir
21.	DR. Saadun Akbar	Dosen Pembina MKPK PP & KN	Hadir
22.	Drs. Suyitno	Dosen Pembina MKPK PP & KN	Hadir
23.	Drs. H. Madari	Dosen Pembina MKPK PP & KN	Hadir
24.	Drs. H. Humaidi Tatapangarsa	Dosen Pembina MKPK PP & KN	Hadir
25.	Drs. Gigit Mujianto, M.Si.	Dosen Pembina MKPK PP & KN	Tidak Dapat Hadir
26.	Ir. Mohammad Chanan, M.Hut.	Pembantu Dekan I Fakultas Pertanian	Hadir
27.	Mohammad Najih, SH., MH.	Pembantu Dekan I Fakultas Hukum	Hadir
28.	Drä. Iswinarti, M.Si.	Pembantu Dekan I Fakultas Psikologi	Hadir
29.	Dra. Vina Salviana DS, M.Si.	Pembantu Dekan I Fak. I. Sosial dan Ilmu Politik	Hadir
30.	Drs. RD. Djatmiko, MM.	Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi	Ijin/ Tidak Dapat Hadir
31.	Ir. Indah Prihartini, MP.	Pembantu Dekan I Fakultas Peternakan	Hadir
32.	Ir. Ermanu Azizul Hakim, MT.	Pembantu Dekan I Fakultas Teknik	Hadir
33.	Drs. Syamsul Rizal Yazid, MA.	Pembantu Dekan I Fakultas Agama Islam	Hadir
34.	DR. Agus Kresno B., M. Kes.	Wakil Direktur I AKPER / Fakultas Kedokteran	Hadir

H. ANGGARAN BIAYA